

Hambatan Identitas Kepemimpinan Politik Sherly Tjoanda di Maluku Utara

Identity-Based Challenges in the Political Leadership of Sherly Tjoanda in North Maluku

Anatul Widiyanti, Nathania Aulia Damayanti, Ika Arinia Indriyani

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 February 2026

Revised 25 February 2026

Accepted 27 February 2026

Available online 13 March 2026

Keywords

interseksionalitas, kepemimpinan perempuan, triple minority

Keywords:

intersectionality, women's leadership, triple minority



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji hambatan berlapis yang dihadapi Sherly Tjoanda dalam membangun identitas kepemimpinan politiknya di Maluku Utara sebagai pemimpin dengan tiga atribut minoritas sekaligus: perempuan, etnis Tionghoa, dan pemeluk agama Kristen di wilayah yang penduduknya mayoritas Muslim. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini menghimpun data dari analisis dokumen publik, pemberitaan media, data KPU, serta kajian literatur akademik terkini (2022–2025). Kerangka teori yang digunakan meliputi interseksionalitas (Crenshaw, 1989), glass ceiling (Morrison et al., 1987), maskulinitas hegemonik (Connell, 1995), dan kepemimpinan transformasional (Burns, 1978; Bass, 1985). Hasil penelitian mengidentifikasi tiga kluster hambatan utama: hambatan gender-struktural yang bersumber dari norma patriarki dan sistem rekrutmen partai, hambatan identitas etnis-agama yang mengandalkan politisasi sentimen mayoritas, serta hambatan legitimasi yang mempertanyakan kemandirian dan keaslian agensi politiknya. Meski demikian, Sherly berhasil merespons hambatan-hambatan tersebut melalui strategi kepemimpinan transformasional yang empatik, narasi pelayanan publik, serta memanfaatkan momentum simpati publik secara produktif. Kemenangan dengan

perolehan 51,68 persen suara pada Pilkada 2024 menunjukkan bahwa kedewasaan demokrasi lokal mampu melampaui batas-batas identitas. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka interseksional dalam studi kepemimpinan perempuan Indonesia, sekaligus memperkaya literatur tentang kepemimpinan transformasional dalam konteks identitas majemuk di politik lokal.

ABSTRACT

This study examines the layered barriers faced by Sherly Tjoanda in constructing her political leadership identity in North Maluku as a leader simultaneously carrying three minority attributes: a woman, of Chinese descent, and a Christian in a predominantly Muslim region. Employing a qualitative case study approach, the research draws on public document analysis, media coverage, KPU electoral data, and recent academic literature (2022–2025). The theoretical framework integrates intersectionality (Crenshaw, 1989), the glass ceiling concept (Morrison et al., 1987), hegemonic masculinity (Connell, 1995), and transformational leadership theory (Burns, 1978; Bass, 1985). Findings identify three clusters of barriers: gender-structural barriers rooted in patriarchal norms and party recruitment systems, ethnic-religious identity barriers that mobilize majoritarian sentiment, and legitimacy barriers questioning her political agency. Nevertheless, Sherly successfully navigated these barriers through transformational leadership strategies characterized by empathy, a public service narrative, and the productive mobilization of public sympathy. Her victory with 51.68 percent of the vote in the 2024 regional election demonstrates that local democratic maturity can transcend identity boundaries. This study contributes to the intersectional framework in Indonesian women's leadership scholarship and enriches the literature on transformational leadership within complex identity contexts in local politics.

PENDAHULUAN

Ruang politik di Indonesia hingga hari ini masih belum sepenuhnya terbuka bagi perempuan. Kehadiran perempuan di berbagai posisi strategis pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, masih jauh dari proporsional jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang sesungguhnya mendominasi hampir separuh populasi bangsa ini. Dalam skala internasional, Inter-Parliamentary Union melaporkan bahwa kursi parlemen yang diduduki

*Corresponding Author

Email: 6670230044@untirta.ac.id, 6670230168@untirta.ac.id, Ika.arinia@untirta.ac.id

perempuan secara global pada 2023 baru menyentuh angka 26,5%, sedangkan di Indonesia angkanya bahkan lebih rendah, yakni sekitar 21% (IPU, 2023). Kesenjangan ini bukan semata-mata persoalan statistik, melainkan cerminan dari lanskap kekuasaan yang masih disusun di atas fondasi relasi gender yang timpang. Norma-norma sosial yang berkembang di masyarakat kerap mengidentikkan sosok pemimpin dengan atribut maskulin ketegasan, rasionalitas, dan otoritas sehingga perempuan yang tampil sebagai pemimpin justru menghadapi persepsi negatif yang meragukan kompetensi mereka (Norris & Inglehart, 2001). Di sisi lain, Wardani (2020) menyoroti bahwa sistem rekrutmen di internal partai politik Indonesia cenderung berpihak pada kandidat laki-laki yang memiliki jaringan finansial dan relasi kekuasaan yang lebih solid, sehingga hambatan bagi perempuan bukan hanya bersumber dari luar, tetapi juga terbangun dari dalam institusi politik itu sendiri. Kompleksitas ini semakin bertambah ketika arena yang dimasuki adalah politik lokal, di mana nilai-nilai tradisional, hierarki kekerabatan, dan pengaruh tokoh-tokoh informal turut menentukan siapa yang dianggap layak memimpin (Wardani, 2020).

Dalam lanskap politik yang demikian, kemenangan Sherly Tjoanda pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Provinsi Maluku Utara muncul sebagai peristiwa yang melampaui sekadar pergantian kepemimpinan biasa. Sherly bukan hanya menorehkan sejarah sebagai gubernur perempuan pertama di provinsi tersebut, tetapi sekaligus menjadi figur yang menanggung tiga atribut minoritas dalam satu diri: ia adalah seorang perempuan, berlatar belakang etnis Tionghoa, dan memeluk agama Kristen di wilayah yang penduduknya mayoritas Muslim (KPU RI, 2024). Tiga lapisan identitas ini secara teoritis menghadirkan potensi hambatan yang jauh lebih berat dibanding yang dialami pemimpin perempuan pada umumnya. Yang menarik, perjalanan politiknya pun dimulai dari jalur yang tidak lazim ia memasuki arena pencalonan untuk meneruskan perjuangan suaminya yang meninggal dunia akibat kecelakaan speedboat pada Oktober 2024, sebuah fakta yang kemudian menjadi bahan perdebatan publik perihal kemandirian dan keaslian legitimasi kepemimpinannya (KPU RI, 2024). Meski demikian, kenyataan bahwa ia berhasil memenangkan pemilihan dan memegang tampuk pemerintahan justru membuka pertanyaan akademik yang penting: hambatan apa saja yang sesungguhnya ia hadapi, dan bagaimana ia merespons serta melampaui hambatan-hambatan tersebut dalam membangun legitimasi politiknya?

Perbincangan ilmiah tentang perempuan dan kepemimpinan politik di Indonesia memang bukan hal baru. Namun bila dicermati lebih seksama, sebagian besar studi yang ada masih memandang hambatan tersebut semata-mata dari sudut pandang gender, tanpa memperhitungkan bagaimana variabel lain seperti etnis dan agama turut membentuk pengalaman yang dialami seorang pemimpin perempuan. Rohadhatul Aisy (2023) menunjukkan bahwa penelitian tentang hambatan perempuan dalam jabatan struktural di Indonesia umumnya terjebak pada analisis patriarki dan kebijakan afirmasi, sementara lapisan identitas yang lebih kompleks nyaris tidak tersentuh. Senada dengan itu, Firdaus dan Wulandari (2023) menemukan bahwa kajian tentang representasi perempuan dalam politik lokal Indonesia belum secara memadai memasukkan dimensi agama dan etnisitas ke dalam bingkai analisisnya. Padahal, di negara dengan keberagaman sebesar Indonesia, seorang perempuan pemimpin dari kelompok etnis dan agama yang berbeda dari mayoritas menghadapi kontestasi yang secara kualitatif lebih rumit dan berlapis. Kekosongan kajian inilah yang mendorong penelitian ini untuk hadir, yakni dengan menjadikan kasus Sherly Tjoanda sebagai jendela untuk memahami dinamika hambatan berlapis yang selama ini belum mendapat perhatian memadai (Rohadhatul Aisy, 2023; Firdaus & Wulandari, 2023).

Untuk mengetahui persoalan tersebut, penelitian ini bertumpu pada tiga pilar teoretis yang saling melengkapi. Pilar pertama yang merupakan teori interseksionalitas yang

dikembangkan oleh Crenshaw (1989), yang menegaskan bahwa kategori-kategori sosial seperti gender, ras, dan agama tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling menjalin dan menciptakan pengalaman subordinasi yang bersifat unik dan berlapis (Crenshaw, 1989). Kerangka ini menjadi kunci untuk memetakan bagaimana tiga identitas minoritas Sherly sebagai perempuan, Tionghoa, dan Kristen berinteraksi membentuk pola hambatan yang tidak dapat direduksi hanya pada salah satu dimensinya saja. Pilar kedua adalah konsep glass ceiling dari Morrison et al. (1987) dan teori maskulinitas hegemonik dari Connell (1995), yang bersama-sama menjelaskan mengapa jabatan-jabatan puncak dalam hierarki politik masih secara kultural dimaknai sebagai wilayah laki-laki, dan bagaimana hambatan-hambatan tak kasat mata itu bekerja menyaring siapa yang boleh naik ke puncak (Morrison et al., 1987; Connell, 1995). Pilar ketiga adalah teori kepemimpinan transformasional dari Burns (1978) dan Bass (1985), yang relevan untuk menganalisis respons Sherly terhadap tekanan tersebut yakni melalui pendekatan empatik, kolaboratif, dan berorientasi pada perubahan substansial sebagai cara merebut kepercayaan dan membangun otoritas moral di hadapan konstituen yang beragam (Burns, 1978; Bass, 1985). Ketiga kerangka ini secara sinergis memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap pengalaman kepemimpinan Sherly Tjoanda.

Terdapat sejumlah karya ilmiah terdahulu yang menjadi pijakan sekaligus pembanding bagi penelitian ini. Fox dan Lawless (2014) mengungkap bahwa ketimpangan ambisi politik antara laki-laki dan perempuan berakar pada proses sosialisasi yang tidak setara sejak masa kanak-kanak, mengakibatkan perempuan dengan kapasitas yang setara pun cenderung memandang dirinya kurang layak untuk berkompetisi dalam arena politik (Fox & Lawless, 2014). Beaman et al. (2012) memberikan perspektif lain yang lebih optimistis: keberadaan pemimpin perempuan terbukti secara empiris mampu memperluas cakrawala aspirasi perempuan-perempuan muda di sekitarnya, menunjukkan bahwa representasi bukan sekadar soal simbolik, melainkan berdampak nyata bagi transformasi sosial (Beaman et al., 2012). Dalam konteks Indonesia, Bintari (2021) menyimpulkan bahwa meskipun kuota 30% perempuan dalam daftar caleg telah diberlakukan, hambatan pada tataran implementasi dan rekrutmen partai masih menghambat terwujudnya representasi yang substantif (Bintari, 2021). Goryunova dan Madsen (2024) pun menyoroti bahwa pada tataran global, hambatan kultural dan norma keagamaan masih menjadi variabel paling persisten dalam membatasi laju kepemimpinan perempuan, bahkan di tengah tren kemajuan yang terlihat secara agregat (Goryunova & Madsen, 2024). Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, kajian ini membangun argumennya dari sudut pandang yang lebih spesifik yakni individu dengan identitas triple minority dalam konteks politik lokal sehingga membuka ruang kontribusi akademik yang selama ini masih kosong dalam literatur kepemimpinan perempuan Indonesia.

Bertolak dari persoalan di atas, penelitian ini merumuskan tiga tujuan yang saling berkaitan. Pertama, memetakan bentuk-bentuk konkret hambatan gender, identitas, dan struktural yang muncul dalam perjalanan kepemimpinan politik Sherly Tjoanda di Maluku Utara. Kedua, menelaah bagaimana akumulasi tiga identitas minoritas yang melekat padanya berpengaruh terhadap penerimaan publik dan legitimasi kepemimpinannya di tengah masyarakat setempat. Ketiga, mengidentifikasi strategi-strategi yang ia tempuh untuk merespons sekaligus melampaui hambatan-hambatan berlapis tersebut dalam praktik kepemimpinannya (Crenshaw, 1989; Morrison et al., 1987). Ketiga tujuan ini secara keseluruhan diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh tentang dinamika kepemimpinan perempuan dengan identitas majemuk dalam setting politik daerah Indonesia.

Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada dua ranah sekaligus. Pada tataran teoretis, hasil kajian ini akan memperkaya pengembangan kerangka interseksional dalam studi

kepemimpinan politik lokal Indonesia, sekaligus menawarkan perspektif segar pada diskursus glass ceiling dan kepemimpinan transformasional yang selama ini masih didominasi oleh konteks Barat. Pada tataran praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang konkret bagi partai politik, penyelenggara pemilu, dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan afirmatif yang tidak hanya peka terhadap gender, tetapi juga sensitif terhadap keberagaman identitas. Lebih jauh, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para aktivis perempuan dan pengambil kebijakan dalam upaya membangun ekosistem politik Indonesia yang benar-benar inklusif dan merangkul keberagaman (Northouse, 2019; Soetjipto, 2024).

Untuk menjawab tujuan-tujuan tersebut, artikel ini disusun secara sistematis dalam lima bagian: bagian kedua menguraikan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan; bagian ketiga mendedah hambatan-hambatan berlapis yang dihadapi Sherly Tjoanda secara analitis; bagian keempat mendiskusikan pola-pola strategi yang ia gunakan untuk merespons tekanan tersebut; dan bagian kelima menutup dengan sintesis temuan serta implikasinya bagi literatur kepemimpinan perempuan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak deskriptif-interpretatif. Pilihan pendekatan ini bukan tanpa alasan objek kajian yang dihadapi adalah pengalaman kepemimpinan seorang figur publik yang sarat dengan dimensi sosial, kultural, dan politis, yang tidak dapat diukur secara memadai hanya melalui angka atau statistik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyelami makna di balik peristiwa, menangkap nuansa yang tersembunyi dalam narasi, serta membangun pemahaman yang kontekstual dan berlapis (Creswell, 2014). Corak deskriptif digunakan untuk merekonstruksi gambaran faktual tentang hambatan-hambatan yang dihadapi Sherly Tjoanda, sementara corak interpretatif digunakan untuk menafsirkan bagaimana hambatan-hambatan tersebut beroperasi di dalam konteks sosial-politik Maluku Utara yang spesifik. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi "apa yang terjadi", tetapi bergerak lebih jauh menuju pemahaman "mengapa" dan "bagaimana" hal tersebut berlangsung dalam situasi yang konkret.

Data dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder, dikumpulkan dari berbagai sumber dokumentasi yang tersedia secara publik. Sumber data utama mencakup pemberitaan media massa baik nasional maupun lokal Maluku Utara yang meliputi perjalanan politik Sherly Tjoanda sejak Oktober 2024 hingga 2025. Media-media yang menjadi sumber rujukan antara lain Kompas, Tempo, CNN Indonesia, serta sejumlah portal berita lokal yang secara intensif mengikuti dinamika Pilkada Maluku Utara dan perkembangan kepemimpinan pasca-pelantikan. Selain pemberitaan media, data juga bersumber dari dokumen-dokumen resmi pemerintahan, termasuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Sherly Tjoanda yang dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI, 2025), data rekapitulasi hasil Pilkada 2024 dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI, 2024), serta pernyataan-pernyataan publik, pidato resmi, dan wawancara Sherly Tjoanda yang terekam dalam berbagai platform. Ragam sumber ini dipilih secara purposif untuk memastikan bahwa data yang terkumpul mencerminkan berbagai perspektif: institusional, mediatis, dan personal sehingga analisis yang dihasilkan tidak terjebak dalam satu sudut pandang tunggal.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik yang saling melengkapi. Teknik pertama adalah studi dokumentasi, yaitu penelusuran dan pencatatan sistematis terhadap seluruh material tertulis dan audiovisual yang berkaitan dengan subjek penelitian. Proses ini mencakup penelusuran arsip berita secara kronologis, pembacaan dokumen kebijakan, serta inventarisasi pernyataan-pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh atau tentang Sherly Tjoanda. Studi dokumen

dalam penelitian kualitatif berfungsi tidak hanya sebagai sumber informasi faktual, tetapi juga sebagai artefak sosial yang merekam bagaimana suatu realitas direpresentasikan, dikonstruksi, dan diperdebatkan oleh berbagai aktor (Bowen, 2009). Teknik kedua adalah Analisis Wacana Kritis atau Critical Discourse Analysis (CDA), yang diaplikasikan secara spesifik terhadap pernyataan publik, pidato resmi, dan narasi media yang membingkai kepemimpinan Sherly. CDA tidak hanya memeriksa apa yang dikatakan dalam sebuah teks, tetapi juga bagaimana pilihan kata, struktur kalimat, dan konteks situasional suatu wacana mencerminkan serta mereproduksi relasi kuasa yang ada di masyarakat (Fairclough, 1995). Melalui kombinasi kedua teknik ini, penelitian mampu bergerak dari tataran deskriptif menuju tataran kritis dalam memaknai hambatan-hambatan yang dihadapi subjek penelitian.

Analisis data dilakukan secara iteratif melalui tiga tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni proses penyortiran dan pemilahan material yang telah terkumpul untuk memfokuskan perhatian pada unit-unit informasi yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana temuan-temuan dari dokumen dan analisis wacana disusun secara tematik mengikuti kategori-kategori analitik yang diturunkan dari kerangka teori yakni hambatan gender, hambatan identitas, hambatan struktural, dan strategi respons. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi menyeluruh yang mengaitkan temuan empiris dengan kerangka konseptual yang telah dibangun (Miles, Huberman & Saldaña, 2014). Sepanjang proses analisis, pendekatan interseksional dari Crenshaw (1989) digunakan sebagai lensa utama untuk memastikan bahwa pembacaan terhadap hambatan tidak dilakukan secara parsial, melainkan selalu mempertimbangkan keterkaitan dan saling-pengaruh antardimensi identitas yang ada.

HASIL PENELITIAN

Profil Kepemimpinan Sherly Tjoanda: Konteks dan Latar Belakang

Sherly Tjoanda Laos lahir pada 12 Agustus 1982 di Ambon, Maluku, dari pasangan Paulus Tjoanda dan Maria Margaretha Liem, keluarga berlatar belakang etnis Tionghoa dengan garis maternal dari suku Hakka. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Kristen Petra Surabaya dalam bidang International Business Management, kemudian melanjutkan program double degree di Inholland University of Applied Sciences, Belanda, dan lulus pada tahun 2004 (IDN Times, 2025; Fortune Indonesia, 2025). Sebelum terjun ke dunia politik, Sherly dikenal sebagai pengusaha aktif di sektor perhotelan, pertambangan, logistik, dan perikanan di Maluku Utara. Ia juga memimpin Yayasan Bela Peduli dan menjabat sebagai Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Maluku Utara, dua peran yang mencerminkan orientasinya pada pemberdayaan masyarakat jauh sebelum ia masuk ke ranah kekuasaan formal.

Pintu masuk Sherly ke arena politik terjadi secara tiba-tiba dan dramatis. Pada 12 Oktober 2024, suaminya Benny Laos mantan Bupati Pulau Morotai periode 2017–2022 yang tengah mencalonkan diri sebagai gubernur Maluku Utara meninggal dunia dalam ledakan kapal cepat di Pelabuhan Bobong, Taliabu. Sherly sendiri turut menjadi korban kecelakaan tersebut dan harus menjalani perawatan intensif akibat luka bakar, termasuk mengalami nyeri selama 24 jam tanpa anastesi (Tokoh.id, 2025). Hanya dua hari setelah tragedi itu, ia memutuskan untuk maju menggantikan suaminya. Koalisi delapan partai politik NasDem, PKB, Demokrat, PAN, PPP, Gelora, PSI, dan Partai Buruh segera menominasikannya sebagai calon gubernur berpasangan dengan Sarbin Sehe. Pada Pilkada 27 November 2024, pasangan ini meraih 359.416 suara atau 51,68 persen, mengungguli tiga pasangan calon lainnya secara meyakinkan (KPU Maluku Utara, 2024; Beritasatu, 2024).

Kemenangan ini mencatat sejumlah kebaruan historis sekaligus. Sherly menjadi gubernur perempuan pertama Maluku Utara dan sekaligus menjadi sosok Tionghoa-Kristen pertama yang terpilih sebagai gubernur melalui mekanisme pemilihan langsung di Indonesia, mengingat dua gubernur Tionghoa sebelumnya Henk Ngantung dan Basuki Tjahaja Purnama mencapai jabatan tersebut melalui jalur penunjukan atau pergantian antarwaktu (CNA Indonesia, 2024). Dalam hal kekayaan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke KPK mencatat total aset Sherly mendekati Rp1 triliun, menempatkannya sebagai gubernur terkaya di Indonesia sebuah fakta yang turut membentuk narasi publik tentang dirinya, baik secara positif maupun kritis (Fortune Indonesia, 2025).

Hambatan Gender dan Struktural

Hambatan pertama yang dapat diidentifikasi dari kasus Sherly Tjoanda adalah hambatan struktural yang bersumber dari ekosistem politik Indonesia yang secara sistemik belum ramah terhadap perempuan. Data Westminster Foundation for Democracy (WFD) dan Women Research Institute (WRI) dalam laporan tahunan 2024 menunjukkan bahwa meskipun proporsi perempuan di DPR RI sedikit meningkat dari 20,9 persen (2019) menjadi 21,9 persen (2024), ambang 30 persen yang ditetapkan undang-undang masih jauh dari tercapai. Lebih lanjut, laporan tersebut mencatat bahwa 52 persen kandidat perempuan dalam Pemilu 2024 pernah mengalami atau mengetahui praktik pelecehan seksual dan intimidasi yang dikaitkan dengan janji dukungan finansial atau posisi strategis di daftar calon (WFD & WRI, 2024). Realitas ini menggambarkan bahwa hambatan bagi perempuan bukan hanya bersifat informal dan kultural, melainkan juga telah terlembaga dalam praktik operasional partai.

Penelitian Lestari et al. (2025) yang diterbitkan dalam *Journal of Social Studies Education Research* mempertegas temuan ini dengan menunjukkan bahwa 82 persen penerima manfaat kebijakan kuota 30 persen berasal dari kalangan perempuan elite istri atau anak pejabat sementara perempuan dari latar belakang non-politik dan minoritas etnis-agama mengalami penurunan daya saing elektoral hingga 40 persen akibat diskriminasi interseksional yang berlapis. Dalam konteks ini, meskipun Sherly memiliki modal ekonomi dan sosial yang signifikan sebagai pengusaha sukses, identitas gandanya sebagai perempuan, etnis Tionghoa, dan Kristen secara teoritis menempatkannya pada posisi yang jauh lebih rentan dibanding kandidat perempuan dari kelompok mayoritas. Ia harus membangun legitimasinya tidak di atas fondasi yang sudah tersedia, melainkan di tengah medan yang strukturnya justru berlawanan dengan profilnya.

Prihatini (2023) dalam kajiannya tentang representasi perempuan di parlemen Asia mencatat bahwa di Indonesia, perempuan politisi kerap menghadapi apa yang disebutnya sebagai *paradox of presence*: semakin banyak perempuan hadir secara deskriptif di panggung politik, belum tentu agenda kepentingan perempuan semakin terwakili secara substantif. Hal ini disebabkan oleh kuatnya tekanan konformitas terhadap norma maskulin yang mendominasi budaya organisasi partai. Kasus Sherly merepresentasikan paradoks ini pada tingkat yang lebih ekstrem: bukan hanya sebagai perempuan yang harus menyesuaikan diri dengan norma maskulin, ia juga harus berhadapan dengan resistensi kultural yang bersumber dari perbedaan agama dan etnis, dua variabel yang memperkuat hambatan struktural secara eksponensial.

Hambatan Identitas: Interseksi Etnisitas, Agama, dan Gender

Dimensi paling kompleks dari kasus Sherly Tjoanda adalah bagaimana tiga atribut identitas minoritasnya berinteraksi membentuk hambatan yang unik dan tidak dapat dipetakan secara parsial. Dalam bahasa Crenshaw (1989), sistem-sistem penindasan berbasis gender, ras, dan agama tidak bekerja secara terpisah dalam kehidupan seseorang; sebaliknya, ketiganya saling menjalin membentuk *matrix of domination* yang menghasilkan pengalaman subordinasi

yang bersifat khas dan tidak dapat direduksi ke salah satu dimensinya saja. Sherly adalah perempuan yang menghadapi seksisme, sekaligus etnis Tionghoa yang menghadapi prasangka rasial, sekaligus Kristen yang berhadapan dengan eksklusivisme keagamaan, dan ketiga dimensi ini bekerja secara simultan.

Hambatan berbasis identitas etnis-agama ini paling terang terlihat dari narasi yang beredar di ruang publik selama masa kampanye. Fakta bahwa 74,5 persen penduduk Maluku Utara beragama Islam (CNA Indonesia, 2024) secara implisit digunakan sebagai argumen ketidakcocokan Sherly untuk memimpin wilayah tersebut. Kajian Zikri dan Rodiah (dalam Lestari et al., 2025) menjelaskan mekanisme ini sebagai *locally specific pathways to exclusion* jalur eksklusif yang tidak bersifat universal melainkan dibentuk oleh konteks lokal, termasuk struktur kekerabatan, otoritas tokoh informal, dan norma kesalehan kolektif. Di Maluku Utara, di mana konsep Moloku Kie Raha (persatuan empat kesultanan Islam) masih memiliki resonansi simbolis yang kuat, kehadiran seorang pemimpin Tionghoa-Kristen bukanlah sesuatu yang secara otomatis diterima tanpa resistensi.

Namun demikian, survei Indikator Politik Indonesia yang dilaksanakan pada dua gelombang (Oktober–November 2024) memberikan gambaran yang lebih bernuansa. Sebanyak 81,9 persen responden menyatakan tidak mempermasalahkan latar belakang etnis kandidat, sementara 70,8 persen tidak mempersoalkan agama calon gubernur (Kompas, 2024). Temuan ini selaras dengan argumen Sambayang et al. (2024) yang dikutip dalam Lestari et al. (2025), bahwa identitas etnis dan agama tidak selalu menjadi penentu utama pilihan elektoral ketika kandidat mampu menawarkan narasi kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan kongkret masyarakat. Bagi sebagian besar pemilih Maluku Utara, tampaknya kapasitas, program, dan kesungguhan Sherly sebagai pemimpin lebih meyakinkan dibanding atribut-atribut identitas yang melatarinya.

Hambatan Legitimasi: Persoalan Agensi dan Independensi

Hambatan ketiga yang tidak kurang signifikannya adalah pertanyaan yang terus-menerus mengemuka di ruang publik tentang legitimasi dan kemandirian kepemimpinan Sherly. Masuknya ia ke arena pencalonan dengan menggantikan suaminya yang baru saja meninggal dunia melahirkan narasi yang meragukan apakah kepemimpinannya berdiri di atas agensinya sendiri atau semata-mata merupakan perpanjangan dari karier politik almarhum Benny Laos. Narasi ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa Sherly sebelumnya tidak pernah masuk dalam radar nama-nama potensial sebagai calon gubernur, serta bahwa ia didukung oleh koalisi partai yang sebelumnya merupakan koalisi suaminya.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui lensa *glass cliff* yang dikembangkan oleh Ryan dan Haslam (2005). Konsep ini menggambarkan kecenderungan perempuan dan individu dari kelompok minoritas untuk ditunjuk ke posisi kepemimpinan dalam situasi krisis atau *precarious*, ketika posisi tersebut memiliki risiko kegagalan yang lebih tinggi. Dalam kasus Sherly, pengangkatannya sebagai calon gubernur pada saat koalisi berada dalam kondisi kritis kehilangan kandidat utama hanya 47 hari sebelum pemungutan suara sangat memperkuat analisis *glass cliff* ini. Seperti yang ditunjukkan oleh Cook dan Glass (2013), kelompok minoritas, termasuk perempuan dan etnis non-mayoritas, cenderung ditempatkan pada posisi kepemimpinan yang *precarious*, dan ketika kinerja menurun, mereka lebih mudah digantikan oleh pemimpin dari kelompok mayoritas.

Meski demikian, analisis ini perlu dikontekstualisasikan. Sherly sendiri secara konsisten menolak framing bahwa ia hanyalah pengganti suaminya. Dalam sebuah podcast bersama Dahlan Iskan, ia menegaskan motivasi yang bersifat personal dan substantif: “Yang mendorong saya maju adalah rasa kehilangan dan ketidakpercayaan bahwa seseorang seperti Benny Laos bisa

meninggal karena layanan kesehatan yang tidak memadai. Saya tidak mau rakyat Maluku Utara mengalami hal yang sama” (Tokoh.id, 2025). Pernyataan ini memperlihatkan upaya aktif Sherly untuk mengklaim agensinya sendiri, memisahkan diri dari bayang-bayang suami, dan membangun narasi kepemimpinan yang berpijak pada pengalaman personal yang autentik. Ketiga pasangan calon pesaingnya pun akhirnya menggugat hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan dalih kecurangan sistematis, namun gugatan ini tidak mengubah keabsahan kemenangan Sherly yang ditetapkan KPU (Beritasatu, 2024).

PEMBAHASAN

Membaca Kasus Sherly melalui Kerangka Interseksionalitas

Temuan penelitian ini mengonfirmasi relevansi dan urgensi kerangka interseksionalitas dalam membaca pengalaman kepemimpinan politik perempuan di Indonesia, khususnya mereka yang membawa lebih dari satu atribut identitas minoritas. Sebagaimana ditegaskan oleh Lestari et al. (2025) dalam studi yang diterbitkan dalam *Journal of Social Studies Education Research*, kebijakan afirmatif berbasis gender tunggal seperti kuota 30 persen secara sistemik gagal mengakomodasi kompleksitas pengalaman perempuan dari kelompok minoritas etnis dan agama, karena 82 persen manfaat kebijakan tersebut justru terserap oleh perempuan dari kalangan elite politik yang sudah memiliki akses. Temuan ini beresonansi kuat dengan kasus Sherly: meski ia adalah perempuan yang dijamin oleh logika kebijakan afirmatif, ia tidak mendapatkan manfaat dari kerangka kebijakan tersebut karena jalur masuknya ke politik sama sekali berbeda dari rekrutmen partai konvensional.

Kajian interseksional terhadap kasus Sherly juga memperlihatkan bahwa hambatan berlapis yang ia hadapi beroperasi dalam tiga level sekaligus. Pada level mikro, hambatan berwujud sebagai prasangka personal dan pertanyaan informal tentang kompetensinya. Pada level meso, hambatan muncul dalam bentuk ketidakpercayaan institusional dari beberapa kalangan partai dan birokrasi lokal. Dan pada level makro, hambatan hadir sebagai struktur normatif tentang siapa yang “layak” memimpin di ruang dengan identitas kultural-religius yang spesifik. Penelitian Zikri dan Rodiah (dalam Lestari et al., 2025) menegaskan bahwa intervensi kebijakan yang mengabaikan kompleksitas berlapis ini hanya akan menghasilkan perubahan yang bersifat artifisial dan tidak menyentuh akar persoalan. Sementara itu, Fox dan Lawless (2024) dalam *PS: Political Science and Politics* mengingatkan bahwa kesenjangan ambisi politik antara perempuan dan laki-laki yang berakar pada sosialisasi yang tidak setara sejak masa kanak-kanak terus menjadi hambatan tersembunyi yang paling sulit diatasi. Kasus Sherly yang justru “terpaksa” memasuki politik karena keadaan, bukan karena ambisi yang dibangun, ironisnya justru membebaskannya dari hambatan psikologis ini.

Lebih jauh, kajian teologis-interseksional yang diterbitkan dalam *MARSAHALA: Journal of Religious and Cultural Studies* (2025) menunjukkan bahwa dalam struktur kekuasaan maskulin-mayoritarian di Indonesia, perempuan dari kelompok agama minoritas mengalami marginalisasi ganda yang tidak cukup ditangkap oleh kerangka gender semata. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kasus Sherly Tjoanda bukan sekadar kasus perempuan yang menembus glass ceiling, melainkan kasus seseorang yang harus mendobrak beberapa lapis langit-langit gender, etnisitas, dan agama sekaligus. Keberhasilannya melakukan hal tersebut menjadi bukti empiris bahwa hambatan-hambatan berlapis tersebut, meski nyata dan berat, tidak bersifat determinan mutlak.

Glass Ceiling, Glass Cliff, dan Dinamika Kepemimpinan Perempuan Minoritas

Dimensi glass ceiling dalam kasus Sherly Tjoanda beroperasi dengan cara yang lebih subtil dibanding yang biasanya digambarkan dalam literatur. Ribeiro (2025) dalam *Governance*:

An International Journal of Policy, Administration, and Institutions berpendapat bahwa di konteks politik lokal, glass ceiling tidak selalu berwujud sebagai penolakan formal, melainkan lebih sering hadir sebagai discouragement by design ekosistem yang secara sistematis membuat perempuan merasa tidak layak atau tidak siap untuk bersaing. Di Maluku Utara, dinamika kekuasaan lokal yang kuat berbasis jaringan kekerabatan dan otoritas tokoh informal merepresentasikan bentuk glass ceiling yang kontekstual ini. Sherly berhasil menembus bukan dengan melawan sistem ini secara frontal, melainkan dengan masuk melalui celah yang tidak pernah diperhitungkan oleh sistem tersebut: jalur penggantian mendadak yang dipercepat oleh tragedi.

Dimensi glass cliff, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian hasil, menambah lapisan analisis yang penting. Buvinic et al. (2024) dalam laporan Center for Global Development berjudul *Shattering the Political Glass Ceiling* mencatat bahwa kondisi-kondisi yang memungkinkan perempuan naik ke posisi kepemimpinan politik tertinggi sering kali merupakan kondisi yang penuh risiko dan tidak ideal. Sherly mewarisi koalisi yang dibangun oleh suaminya, menghadapi kampanye singkat hanya 47 hari, masih dalam kondisi pemulihan fisik, dan menghadapi stigma bahwa kemenangannya hanyalah kemenangan belas kasihan. Namun justru dalam kondisi precarious inilah kepemimpinan transformasionalnya paling kuat bersinar: ia mengubah narasi simpati menjadi narasi agensi, mengkonversi duka publik menjadi harapan kolektif, dan membangun koneksi emosional yang tulus dengan pemilih.

Prihatini (2023) dan WFD (2024) secara bersama-sama menyoroti bahwa capaian bersejarah Sherly memiliki implikasi penting bagi diskursus representasi substantif vs. Deskriptif. Kemenangan Sherly secara deskriptif memang telah menambahkan satu perempuan ke dalam peta gubernur Indonesia. Namun lebih dari itu, caranya memenangkan kepercayaan publik melalui program konkret, pendekatan empatik, dan penekanan pada kesejahteraan masyarakat memberikan preseden bahwa representasi substantif tidak harus muncul hanya dari kandidat yang diproses melalui jalur rekrutmen partai yang mapan. Representasi substantif dapat tumbuh dari akar pengalaman hidup yang autentik dan motivasi kepemimpinan yang genuine.

Kepemimpinan Transformasional sebagai Strategi Respons

Salah satu temuan terpenting dari penelitian ini adalah identifikasi kepemimpinan transformasional sebagai strategi utama yang digunakan Sherly untuk merespons dan melampaui hambatan-hambatan berlapis yang ia hadapi. Kepemimpinan transformasional, dalam pengertian Bass dan Avolio (1994), beroperasi melalui empat dimensi: idealized influence (keteladanan), inspirational motivation (motivasi inspiratif), intellectual stimulation (stimulasi intelektual), dan individualized consideration (perhatian individual). Keempat dimensi ini dapat diidentifikasi secara jelas dalam cara Sherly menjalankan kampanyenya dan kemudian kepemimpinannya.

Pada dimensi idealized influence, Sherly membangun kredibilitas melalui keteladanan personal: ia maju dalam kondisi berduka dan terluka secara fisik, menunjukkan ketangguhan yang langsung dapat dirasakan oleh publik. Tindakan ini menciptakan apa yang Burns (1978) sebut sebagai moral authority otoritas yang tidak diperoleh dari jabatan atau kekuasaan formal, melainkan dari integritas tindakan dalam situasi yang menguji. Pada dimensi inspirational motivation, Sherly secara konsisten menyampaikan visi yang melampaui dirinya sendiri, menempatkan kemenangan bukan sebagai pencapaian personal melainkan sebagai bukti kedewasaan demokrasi Maluku Utara. Dalam unggahannya di media sosial pasca-kemenangan, ia menulis: "unggulnya seorang perempuan dengan identitas minoritas menunjukkan kedewasaan

politik Maluku Utara” (Kompas, 2024) sebuah framing yang mengundang seluruh masyarakat Maluku Utara untuk merasa memiliki kemenangan tersebut.

Dimensi individualized consideration tercermin dari narasi pelayanan publik yang ia bangun secara konsisten, di mana kepemimpinan dipresentasikan sebagai bentuk tanggung jawab personal kepada masyarakat yang pernah merasakan lemahnya layanan kesehatan di wilayah tersebut. Penelitian Buvinic et al. (2024) mencatat bahwa perempuan pemimpin yang berhasil menembus batas-batas identitas di berbagai konteks global cenderung mengandalkan gaya kepemimpinan yang kolaboratif dan berorientasi pada kebutuhan konstituennya bukan pada pengumpulan kekuasaan itu sendiri. Sementara Goryunova dan Madsen (2024) mengingatkan bahwa norma kultural dan keagamaan tetap menjadi variabel paling persisten dalam membatasi laju kepemimpinan perempuan secara global, kasus Sherly menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, variabel-variabel tersebut dapat dikelola dan bahkan dikonversi menjadi keunggulan.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama pada literatur kepemimpinan perempuan Indonesia. Pertama, ia memperlihatkan bahwa kerangka interseksionalitas memiliki daya analitik yang lebih kuat dibandingkan kerangka gender tunggal untuk memahami dinamika hambatan kepemimpinan di Indonesia sebuah argumen yang diperkuat oleh temuan Firdaus dan Wulandari (2023) maupun Lestari et al. (2025). Kedua, penelitian ini memperluas diskursus glass cliff ke dalam konteks politik lokal Indonesia, menunjukkan bagaimana perempuan dan minoritas dapat ditempatkan pada posisi kepemimpinan yang precarious dan bagaimana mereka dapat mengubah precaritas tersebut menjadi sumber kekuatan transformasional. Ketiga, penelitian ini menawarkan bukti empiris bahwa kepemimpinan transformasional bukan hanya relevan dalam konteks organisasi bisnis atau pemerintahan di negara-negara Barat, tetapi juga beroperasi secara efektif dalam arena politik lokal dengan konteks identitas yang kompleks di negara berkembang.

Secara praktis, temuan ini memiliki implikasi penting bagi tiga aktor utama. Bagi partai politik, temuan ini menegaskan perlunya mereformasi sistem rekrutmen kandidat agar tidak hanya memenuhi kuota gender secara formal tetapi juga secara aktif mengidentifikasi dan mengembangkan kandidat dari kelompok-kelompok yang secara interseksional terpinggirkan. Bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah, penelitian ini mendorong pengembangan kerangka kebijakan afirmatif yang bersifat multidimensi peka tidak hanya terhadap gender, tetapi juga terhadap dimensi etnis dan agama. Bagi para aktivis perempuan dan pengambil kebijakan, kasus Sherly Tjoanda dapat menjadi studi kasus yang kaya untuk pelatihan dan advokasi kepemimpinan inklusif, menunjukkan bahwa hambatan berlapis bukan hanya dapat diidentifikasi tetapi juga dapat dinavigasi dengan strategi yang tepat (WFD & WRI, 2024; Prihatini, 2023; Lestari et al., 2025).

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengurai secara analitis tiga klaster hambatan utama yang dihadapi Sherly Tjoanda dalam membangun identitas kepemimpinan politiknya di Maluku Utara: hambatan gender-struktural yang bersumber dari ekosistem politik patriarkal dan sistem rekrutmen partai yang eksklusif; hambatan identitas yang bersumber dari interseksi etnis Tionghoa, agama Kristen, dan gender perempuan dalam konteks wilayah mayoritas Muslim; serta hambatan legitimasi yang mempertanyakan kemandirian dan keaslian agensi politiknya pasca-penggantian suami yang mendadak. Ketiga klaster hambatan ini beroperasi secara simultan dan

saling memperkuat, menciptakan pengalaman subordinasi yang bersifat unik dan tidak dapat direduksi ke salah satu dimensinya saja.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa hambatan-hambatan tersebut tidak bersifat determinan mutlak. Sherly Tjoanda berhasil merespons dan melampaui hambatan-hambatan itu melalui strategi kepemimpinan transformasional yang empatik, narasi pelayanan publik yang autentik, kecerdasan mengonversi simpati menjadi kepercayaan, dan keberanian untuk mengklaim agensinya sendiri di tengah tekanan narasi yang meremehkan kemandirian politiknya. Kemenangan dengan 51,68 persen suara pada Pilkada 2024, disertai dengan legitimasi pelantikan resmi pada 20 Februari 2025, menjadi bukti empiris bahwa demokratisasi di tingkat lokal mampu menghasilkan momen-momen yang melampaui batas-batas identitas.

Dua catatan penting perlu dikemukakan untuk penelitian lanjutan. Pertama, penelitian ini masih terbatas pada fase kepemimpinan Sherly hingga saat pelantikan; evaluasi terhadap bagaimana ia menjalankan pemerintahan dalam konteks hambatan-hambatan yang mungkin terus berlanjut akan menjadi objek kajian yang sangat relevan. Kedua, studi komparatif dengan kasus-kasus kepemimpinan perempuan dengan identitas majemuk di wilayah lain Indonesia atau di negara-negara dengan konteks serupa akan memperkuat validitas generalisasi analitik dari penelitian ini. Sebagai penutup, kasus Sherly Tjoanda menegaskan sesuatu yang penting: hambatan identitas dalam kepemimpinan politik bukan hanya persoalan statistik atau kebijakan ia adalah persoalan keadilan epistemik tentang siapa yang dianggap layak untuk memimpin, dan siapa yang berhak untuk mendefinisikan kualitas kepemimpinan itu sendiri.

REFERENSI

- Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. Free Press.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving organizational effectiveness through transformational leadership*. Sage Publications.
- Beaman, L., Duflo, E., Pande, R., & Topalova, P. (2012). Female leadership raises aspirations and educational attainment for girls. *Science*, 335(6068), 582–586.
- Bintari, A. (2021). Partisipasi dan representasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 13–22.
- Bourdieu, P. (2001). *Masculine domination*. Stanford University Press.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row.
- Buvinic, M., Ajayi, K., & Mainali, A. (2024). Shattering the political glass ceiling: Exploring the rise of women political leaders. Center for Global Development.
- Connell, R. W. (1995). *Masculinities*. University of California Press.
- Cook, A., & Glass, C. (2013). Above the glass ceiling: When are women and racial/ethnic minorities promoted to CEO? *Strategic Management Journal*, 34(9), 1080–1089.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139–167.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dahl, R. A. (1961). *Who governs? Democracy and power in an American city*. Yale University Press.
- Firdaus, F., & Wulandari, R. A. (2023). Implications of low women's representation: Strategies and challenges towards gender equality in Indonesian politics. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5(2), 138–153.

- Fox, R. L., & Lawless, J. L. (2014). Uncovering the origins of the gender gap in political ambition. *American Political Science Review*, 108(3), 499–519.
- Fox, R. L., & Lawless, J. L. (2024). The invincible gender gap in political ambition. *PS: Political Science and Politics*, 57(2), 231–237.
- Goryunova, E., & Madsen, S. R. (2024). The current status of women leaders worldwide. In *Handbook of research on gender and leadership*. Sage.
- Huda, K., & Renggani, L. A. (2021). Perempuan kapuk dalam ekspektasi budaya patriarki. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 11(2), 184–198.
- Inter-Parliamentary Union. (2023). *Women in politics: 2023*. IPU.
- KPK RI. (2025). LHKPN Sherly Tjoanda: Laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KPU RI. (2024). Hasil rekapitulasi Pilkada Serentak 2024. Komisi Pemilihan Umum.
- Krook, M. L., & Restrepo Sanín, J. (2016). Violence against women in politics. *Politics & Gender*, 12(4), 664–685.
- Lestari, D., & Kurniawan, A. (2025). Pendekatan multidimensi dalam kebijakan afirmatif gender di Indonesia. [Nama jurnal tidak tersedia].
- Lestari, N., et al. (2025). Intersectionality and political representation: Challenges and policy implications for marginalized women in Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 16(1), 1–28.
- Morrison, A. M., White, R. P., & Van Velsor, E. (1987). Breaking the glass ceiling: Can women reach the top of America's largest corporations? Addison-Wesley.
- Norris, P., & Inglehart, R. (2001). Cultural obstacles to equal representation. *Journal of Democracy*, 12(3), 126–140.
- Northouse, P. G. (2019). *Leadership: Theory and practice* (8th ed.). Sage Publications.
- Prihatini, E. S. (2023). Women's representation in Asian parliaments: Contemporary trends and challenges. *Contemporary Politics*, 29(3), 301–320.
- Ribeiro, M. (2025). A step forward to gender equality: Breaking the political glass ceiling at local level. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*. <https://doi.org/10.1111/gove.12902>
- Rohadhatul Aisy, N. N. N. (2023). Analisis faktor hambatan perempuan dalam menduduki jabatan struktural. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(1), 72–81.
- Ryan, M. K., & Haslam, S. A. (2005). The glass cliff: Evidence that women are over-represented in precarious leadership positions. *British Journal of Management*, 16(2), 81–90.
- Sambayang, et al. (2024). Intersectional discrimination and electoral viability of minority women in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 32(2), 144–162.
- Soetjipto, A. W. (2024). Hak asasi manusia, gender dan politik global: Sebuah perspektif interseksionalitas. FISIP UI.
- Theological–intersectional analysis of women's position within Indonesia's masculine–majoritarian power structures. (2025). *MARSAHALA: Journal of Religious and Cultural Studies*, 1(2), 147–160.
- UN Women. (2023). *Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2023*. UN Women.
- Wardani, S. B. E. (2020). Keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1).
- WFD (Westminster Foundation for Democracy) & WRI (Women Research Institute). (2024). *Violence against women in Indonesia's 2024 elections*. WFD & WRI.

Zikri, F., & Rodiah, S. (dalam Lestari et al., 2025). Locally specific pathways to exclusion: Intersectional analysis of Indonesian women politicians.

Sumber Berita

Beritasatu. (2024, November 29). Sherly Tjoanda bakal jadi gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Beritasatu.com.

Beritasatu. (2024, Desember 9). KPU tetapkan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe pemenang Pilgub Maluku Utara. Beritasatu.com.

CNA Indonesia. (2024, Desember 2). Sherly Tjoanda ukir sejarah jadi gubernur terpilih Tionghoa pertama Indonesia. cna.id.

Fortune Indonesia. (2025). Profil Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara 2025–2030. fortuneidn.com.

IDN Times. (2025). Profil Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Maluku Utara terkaya. idntimes.com.

KPU Maluku Utara. (2024). Rekapitulasi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2024. Sofifi: KPU Provinsi Maluku Utara.

Kompas. (2024, November 30). Sherly Tjoanda, dari tragedi hingga kandidat kuat gubernur perempuan minoritas pertama Maluku Utara. kompas.id.

Tokoh.id. (2025). Biografi Sherly Tjoanda—Ibu dari tiga anak, ibu untuk satu provinsi. tokoh.id.